

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA ORO-
ORO OMBO KECAMATAN BATU KOTA BATU**

(studi pada desa oro-oro ombo kecamatan batu kota batu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh :

NOVRIAYANTO DAHA WOLA

NIM. 2019210026

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2023

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA ORO-ORO OMBO KECAMATAN BATU KOTA BATU**

(Studi Pada Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu)

Novriyanto Daha Wola, Asih Widi Lestari, Firman Firdausi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas

Tribhuwana Tunggadewi Malang

E-mail: novriyantowola@gmail.com

ABSTRAK

Tata Kelola Kolaboratif Kajian ini berfokus pada pengembangan Wisata Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Batu Kota Batu . Tata kelola kolaboratif mengacu pada keterlibatan kolektif individu dalam upaya terkoordinasi untuk mengatasi tantangan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran tata kelola koperasi dalam pengembangan pariwisata Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu. Dalam hal ini, pemeriksaan ekspresif dengan pendekatan subyektif dianut sebagai strategi investigasi. Ada sumber informasi penting dan tambahan yang digunakan. Untuk menemukan sumber dilakukan pengujian purposive. Informasi dikumpulkan melalui persepsi, pemeriksaan dan kesimpulan. Strategi pemeriksaan informasi menggabungkan pengurangan informasi, pengenalan informasi, dan legitimasi informasi. Kolaborasi Pemerintahan Dalam Peningkatan Pariwisata Kota oro-oro Ombo di Kawasan Batu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kota Batu terbukti bermanfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, khususnya mengenai partisipasi, penerimaan, komunikasi, kepercayaan dan berbagi hasil sebagai hasil hubungan kerja. Kolaborasi antara pemerintah kota dan BUMDes dalam memajukan desa wisata sangat luar biasa, terus mengikutsertakan masyarakat sekitar melalui rapat kerja desa .

Kata kunci : Collaborative Governance, pengembangan wisata.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya suatu pembangunan ialah suatu usaha yang diawali dengan perbaikan ekonomi, budaya, dan politik di tingkat nasional dan daerah serta membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sektor pariwisata merupakan salah satu kunci pembangunan Indonesia. Pengembangan kepariwisataan merupakan pengembangan yang berupaya memperbaiki setiap struktur dan fungsi agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Pengembangan kepariwisataan meliputi semua usaha komersial yang tindakan terkoordinasi yang dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, barang, jasa, dan peralatan yang diperlukan untuk menarik dan memenuhi kebutuhan wisatawan.

Desa Oro-Oro Ombo terletak di Kota Batu. Hutan Tahura R. Soeryo dan Perhutani yang menempati areal seluas 11.000 hektar ini memiliki potensi pemandangan gunung yang memukau, yang dapat menyumbangkan kekayaan alam, budaya, dan potensi seni dalam pengembangan wisata buatan untuk tujuan wisata. Menarik pengunjung. Hasilnya, perkembangan positif jumlah wisatawan dari tahun 2011 hingga 2019 memungkinkan 6 juta pengunjung pada tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Menurut BPS, banyak objek wisata khususnya banyak orang datang untuk mengamati artefak wisata buatan manusia dan menghargai keindahan alam di Desa Oro-oro Ombo di kaki Gunung Pandaman. Hal ini menciptakan peluang bagi kepala desa dan penduduk lokal untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan atau pekerjaan yang bermunculan di sekitar mereka. Menindaklanjuti realisasi tersebut pada musyawarah desa dengan masyarakat, pemerintah desa membentuk berbagai sektor usaha desa, termasuk sektor transportasi pariwisata, berdasarkan konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk membantu pengunjung yang berkunjung ke Oro oro Ombo, pemerintah daerah dan masyarakat mengembangkan unit usaha angkutan wisata. Ada tiga fasilitas wisata di dalamnya, antara lain toko oleh-oleh yang menjual bahan makanan desa, toilet dan toilet umum, serta layanan katering untuk rombongan yang berkunjung. Badan Usaha Angkutan Pariwisata didirikan sebagai BUMDes untuk mengembangkan dan menggali potensi desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal. Pengelolaan unit usaha angkutan wisata oleh BUMDes setempat memerlukan kerjasama dan partisipasi masyarakat setempat. Pengelolaan lalu lintas wisata berbasis partisipasi masyarakat mendukung pertumbuhan sosial ekonomi desa Oro Oro Ombo dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat dan desa Oro Oro Ombo. Pengelolaan angkutan wisata yang melibatkan masyarakat setempat mengedepankan budaya partisipasi masyarakat, komunikasi dan gotong-royong..

Kepariwisataan yang sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 dapat berupa pengaturan kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh berbagai dinas dan administrasi yang diberikan oleh masyarakat sekitar, dunia usaha dan pemerintah untuk memajukan kepariwisataan. Pertumbuhan pariwisata membutuhkan beberapa faktor kunci seperti jalan yang memadai, transportasi dan fasilitas lainnya untuk mendukung pengembangan pariwisata..

Desa memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengarahkan urusan pemerintahan, persinggungan masyarakat ketetangaan berdasarkan kegiatan masyarakat, hak-hak dasar atau hak-hak konvensional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biasanya sebuah perusahaan. organisasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peran pemerintah dalam menciptakan divisi pariwisata sangat bermanfaat, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang berguna dan mampu memberi

manfaat bagi masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan wilayah desa yang merata dan menciptakan lapangan kerja masyarakat desa di masa depan.

Ansell dan Gash (dalam Zaenuri 2016) menganalisis pertumbuhan tata kelola, tata kelola kolaboratif, sebagai fenomena dan (tren) baru yang menarik. Tata kelola kolaboratif merupakan salah satu strategi untuk menjawab kepentingan dari sulitnya anggaran pemerintah tidak mampu mengimbangi Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi perubahan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Pemegang saham memiliki aset tersebut (Sambodo, 2016).

Hal ini merupakan langkah krusial dalam upaya pemerintah menciptakan masyarakat wisata guna melestarikan potensi dan keunikan masyarakat. Desa wisata didefinisikan sebagai desa, baik dikelola dan dikemas secara atraktif dan atraktif, dengan berbagai peluang, keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik dari segi kualitas fisik lingkungan pedesaan maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya. desa yang mulia. tata krama. Strategi alam dengan mengembangkan organisasi pendukung pariwisata yang dapat menyerap dan mendorong kegiatan ekonomi dari kunjungan wisatawan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Shah, 2017).

Pendirian BUMDes sebagai lembaga ekonomi daerah baru dan bidang usaha termasuk bidang usaha transportasi pariwisata di dalamnya secara tidak langsung akan membawa nilai-nilai baru yang mengubah situasi sosial. Kondisi yang menguntungkan akan tercipta untuk pengembangan modal sosial masyarakat kelas menengah jika transportasi wisata diterapkan di komunitas lokal. Karena modal sosial dianggap sebagai salah satu faktor terpenting untuk mendorong kohesi, likuiditas, saling percaya dan saling menguntungkan guna mencapai kemajuan bersama.

Kusumawati Putri Arum (2017) melakukan penelitian tentang tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata. Berdasarkan temuan penelitian ini, Masyarakat Desa Oro Oro Ombo Kota Batu Berpegang pada konsep solidaritas, gotong royong dan saling menghormati, mereka memiliki modal sosial yang signifikan yang bersumber dari karakteristik masyarakat yang tinggal di pedesaan. kesopanan. Modal sosial masyarakat Desa Oro-oro Ombo tercipta melalui asosiasi, organisasi masyarakat, dan praktik masyarakat yang masih bertahan. Modal sosial masyarakat desa di bidang transportasi meliputi budaya partisipasi jaringan sosial, saling percaya dan gotong royong. Pertumbuhan pariwisata di desa Olooorombo cukup baik, namun masih terdapat kendala atau kendala seperti peran tata kelola kolaboratif dalam penyelenggaraan desa wisata persinggahan, Hal ini tercermin dari tingkat kepercayaan yang tinggi yang didukung oleh norma-norma sosial yang kuat. Kolaborasi antar kelompok dalam jejaring sosial.

Berdasarkan hasil gambaran diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul **“Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, didasarkan masalah yang disajikan di latar belakang, termasuk:

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas dan lain-lain, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tata kelola koperasi dalam pengembangan pariwisata di Desa Olooro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat tata kelola koperasi dalam pengembangan pariwisata Desa Olooro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu?

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian, antara lain, hasil yang diprediksi dapat dipertimbangkan.:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari kajian ini adalah berencana untuk memberikan referensi, data lengkap dan mengetahui lebih jauh seputar partisipasi pemerintah dalam menciptakan pariwisata di Kota Olooro Ombo, Daerah Batu, Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang tata kelola koperasi dalam pengembangan pariwisata Desa Olooro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu..

b. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih inovatif, kreatif serta tepat dalam upaya pemerintah dalam pengembangan wisata Desa Oro-Oro Ombo kecamatan Batu Kota Batu.

c. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi bahan referensi untuk meneliti lain yang berkeinginan melakukan riset yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan. (2008). *Eletronic Government for good Governance*. .jurnal system informasi dan manajemen teknologi informasi. Volume (1)
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*.
- Kusumawati, P. A. (2017). *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Unit Usaha Transit Wisata Kota Batu (Studi pada BUMDes Panderman Di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Labolo, M. (2008). Memahami ilmu pemerintahan. Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung*.
- Soekanto, S. (2004). Sosiologi Suatu Pengantar (Cet 37: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan Desa. Zanafa Publishing.
- Raharja, Sam'un. (2008). "Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum, Disertai Program Doktor Ilmu Administrasi Public" Depok : Universitas Indonesia
- Statistik, B. P. (2020). Kota Batu Dalam Angka. *Batu: BPS*.
- Syah, F. (2017). Strategi mengembangkan desa wisata.
- Sambodo Giat Tri. 2016. "pelaksanaan *collaborative governance* di desa budaya brotot, galur, kulonprogo, DIY", Jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Vol.3 No.1
- Soemaryani Imas. 2016. Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development. *Journal. Academy of Strategic Management. Volume 15, Special Issues 3*
- Sedarmayanti. (2012). *Good Government (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju
- Sinambella. (2006). *Reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
- Suhady. (2005). *Dasar-dasar Good governance*. Jakarta: UNDP
- Sumarno, A. (2012). Pengembangan Pariwisata. Bandung: Gramedia Pustaka Utama
- Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo)*. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3).
- Yuliani. (2017). "kolaborasi dalam perencanaan program kota kumuh (KOTAKU) di kelurahan semanggi kota Surakarta. *Journal wacana public*. Vol.1, No 2.
- Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif *collaborative governance* (studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten selemang)
- Zulkarnain. (2002). *kendala terwujudnya Good Governace*. .www, kompasania. Com